

MILIK PERPUSTAKAAN	
UNIVERSITAS ATMA JAYA	
MOJOKERTO	
Diterima	: 25 SEP 2002
Investasi	022/MH/Hd.9/2002
Klasifikasi	Rf: 346.07/Tri/02
Katalog	:
Selesai diproses	:



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
PENGGUNA JASA LAYANAN PARKIR TERHADAP
PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU DALAM KARCIS
BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DI WILAYAH KOTA
YOGYAKARTA**

Diajukan oleh :

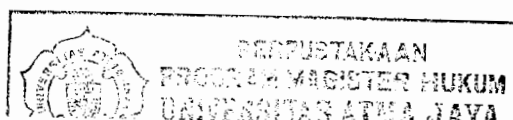
TRI KARYONO

No. Mhs. : 00.589/PS/MH

Nirm : 000051051201130008

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR MAGISTER HUKUM

2002





UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Nama : Tri Karyono
Nomor Mahasiswa : 00.589/PS/MH
NIRM : 000051051201130008
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul tesis : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA LAYANAN PARKIR TERHADAP PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU DALAM KARCIS BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

tanggal

tanggal

Pembimbing I,

Pembimbing II,

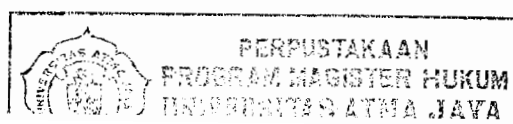
Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., MS.

J. Widiyantoro, SH., MH.



Direktur Program,

Dr. Ir. Peter F. Kaming, M. Eng.





UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA
LAYANAN PARKIR TERHADAP PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU
DALAM KARCIS BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI WILAYAH KOTA
YOGYAKARTA**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Tri Karyono, SH.

Tesis ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Pada tanggal 9 Maret 2002

Dewan Penguji,

Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., MS.

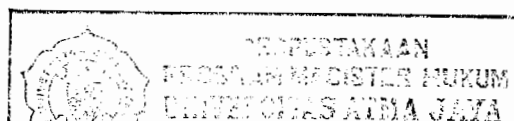
Ketua

Iswantiningsih, SH., MS.

Anggota

J. Widiantoro, SH., MH.

Anggota



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat, rahmat dan kasih-Nya tesis yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA LAYANAN PARKIR TERHADAP PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU DALAM KARCIS BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA” dapat diselesaikan. Adapun pembuatan tesis ini diajukan guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tesis yang telah tersusun ini masih jauh dari sempurna, dalam arti masih terdapat kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan, baik dari segi sistematika penulisan, susunan materi, penggunaan bahasa, maupun substansinya meskipun penulis telah berupaya semaksimal mungkin. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna penyempurnaan tesis ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin sampaikan secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Peter F. Kaming, M. Eng selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., MS. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak J. Widijantoro, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak B. Bambang Riyanto, SH., M. Hum selaku ketua Program Magister Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Pranyoto Adhi Wahyono Kepala UPTD Dinas Perhubungan dan Staf, Bapak Adi Subroto Kepala Seksi Operasi dan Niaga DAOP VI Yogyakarta dan Staff, Bapak Drs. Ari Prajanto Kepala Stasiun Tugu Yogyakarta dan Staf, Bapak Nuriman SH. Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, Ibu Martopo Staf YLKI Yogyakarta, Asisten General Manager Galeria Mall, Ramai Mall, Malioboro Mall, dan Bapak Wahyu Wijayanto pengelola parkir Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, yang telah membantu memberikan data-data untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan tesis ini.
6. Dosen-Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah mendidik dan membimbing penulis selama ini.
7. Para Admisi dan Staf Unit Foto Copy yang telah banyak membantu penulisan selama menyelesaikan Program Magister Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

8. Keluarga bapak Tony Spontana, SH Jaksa Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyusun tesis ini.
9. Yang tercinta Isteriku Dewi Anna Kurnianingrum dan Anak-anakku Freddy Roesthodi Hendrawan, Frelliday Antho Maya, Frellika Indhana Ainun Nazikha, Rinda Yusticia Indira Putri, Rima Yusticia Puspaning Putri, atas doa maupun dorongan moril dan materiil kepada penulis selama penulis menyelesaikan Program Magister Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
10. Ananda Letda. Kal Yusuf Rusdianto, yang telah memberi motivasi selama dalam penyusunan tesis ini.
11. Teman-teman penulis di Program Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta atas persahabatan yang telah diberikan selama ini.

Akhir kata semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya, khususnya bagi pengembangan hukum bisnis di Indonesia.

Yogyakarta, Maret 2002

Penulis,

Tri Karyono
00.589/PS/MH

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA LAYANAN PARKIR TERHADAP PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU DALAM KARCIS PARKIR BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA, Tri Karyono, 00589/PS/MH, Pebruari 2002, Konsentrasi Hukum Bisnis, Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Sejak disahkan, masih banyak ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang diabaikan oleh pelaku usaha. Salah satunya adalah pencantuman klausula baku dalam karcis parkir. Apabila terjadi kehilangan kendaraan yang diparkir, selama ini konsumen menjadi pihak yang selalu dirugikan, karena pelaku usaha penyedia jasa layanan parkir menolak untuk memberikan ganti rugi dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab konsumen sebagaimana klausula yang tercantum dalam karcis parkir. Untuk itulah dilakukan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa layanan parkir terhadap penggunaan klausula baku dalam karcis parkir berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) di wilayah kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPK kepada konsumen pengguna jasa layanan parkir terhadap penggunaan klausula baku dalam karcis parkir. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan alat wawancara dan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan UUPK terhadap konsumen pengguna jasa layanan parkir adalah dengan menyediakan alternatif penyelesaian masalah dengan jalan musyawarah atau dengan mengajukan tuntutan hak langsung melalui lembaga peradilan untuk menuntut ganti kerugian. Alternatif kedua lebih menjamin perlindungan hukum karena memberikan kepastian hukum kepada konsumen, di samping itu pengadilan negeri di Yogyakarta telah pernah memberikan putusan yang menyatakan bahwa klausula baku dalam karcis parkir yang berisi pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah cacat hukum sehingga tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum. Upaya yang dilakukan pelaku usaha penyedia jasa layanan parkir di Yogyakarta dalam mensikapi ketentuan tentang larangan pencantuman klausula baku ini kurang kondusif, karena mereka tetap mencantumkan klausula tersebut dengan alasan sekedar sebagai peringatan kepada konsumen untuk ikut serta menjaga keamanan kendaraan yang diparkir, walaupun pelaku usaha menyatakan akan konsekuen tidak akan menghindar dari tanggung jawab memberikan ganti rugi apabila terjadi kehilangan kendaraan yang diparkir. Kondisi ini perlu dibenahi misalnya dengan mencantumkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam karcis parkir, di samping perlunya secara selektif dan efisien dilakukan sosialisasi UUPK di kalangan masyarakat konsumen dan pelaku usaha.

Kata kunci : perlindungan hukum, klausula baku, parkir.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR THE PARKING SERVICE USERS AGAINST STANDARD CLAUSE ADDED ON THE PARKING TICKET ACCORDING TO ACT NO. 8/1999 ON CONSUMER PROTECTION IN THE DISTRICT OF YOGYAKARTA CITY,

Tri Karyono, 00589/PS/MH, February, 2002, Business Law Concentration,
Study Program of Magister of Law, Postgraduate Program,
Universitas Atmajaya Yogyakarta

Act No. 8/1999 on Consumer Protection (ACP) still contains some provisions disregarded by business people since it was legalized in 1999. One of the disobedient actions is the standard clause inclusion on the parking ticket. So far, if the vehicle parked is missing, consumer becomes the disadvantaged party, because the parking service provider refuses to disburse compensation by the reason that the consumer is also responsible for the safety of his or her vehicle, according to the clause attached on the parking ticket. Considering the background, a research on legal protection for the parking service users against the use of standard clause added on the parking ticket according to the Act No. 8/1999 on Consumer Protection (ACP) in Yogyakarta City was carried out. The purpose of the research is to determine how the legal protection is assigned by ACP to the parking service users against standard clause added on parking ticket. Data in use are primary and secondary data. Primary data are obtained from field research using interview and questionnaire instrument, while secondary data are taken through literature study. The result of the research indicates that legal protection provided by ACP for the parking service users is by providing problem solving alternatives such as discussion or directly prosecuting the rights through legal institution to demand compensation. The second alternative provides stronger assurance of legal protection since it provides legal certainty to consumer. Besides, the courthouse of Yogyakarta city has once resolved a judgment stating that the standard clause on parking ticket containing responsibility exemption from the service provider is legally invalid, that it is illegal and therefore it is null and void. The efforts made by the parking service providers in Yogyakarta in dealing with the provisions on the prohibition of the clause inclusion is not favorable, for they keep adding the clause by the reason to simply warn the consumers to participate in protecting the safety of their vehicles parked, although the service providers maintain that they will not avoid their accountability to pay compensation for the loss, if the vehicle parked is missing. The condition needs improvements such as the addition of the service provider's and consumer's rights and obligations on the parking ticket and introducing the ACP among consumers and service providers in selective and efficient manner.

Keywords: legal protection, standard clause, and parking

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TESIS	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
INTISARI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Perumusan Masalah	8
3. Batasan Konseptual	9
4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
5. Keaslian Penelitian	11
6. Sistematika Penulisan	12
BAB II. PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERJANJIAN BAKU DALAM KARCIS PARKIR	13
A. Hukum Perlindungan Konsumen	13
1. Pengertian Perlindungan Hukum	13
2. Pengertian Konsumen	16
3. Perlindungan Konsumen	19
4. Perlindungan Konsumen Secara Global	21
5. Perlindungan Konsumen di Indonesia	27
6. Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen	33
7. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Ta- hun 1999	35
	vi

B. Perjanjian Baku	42
1. Pengertian Perjanjian	42
2. Asas-Asas Perjanjian	44
3. Syarat Sahnya Perjanjian	46
4. Pengertian Perjanjian Baku	50
C. Tinjauan Atas Parkir Kendaraan Bermotor	57
1. Pengertian Parkir	57
2. Karcis Parkir	58
3. Pengelolaan Perparkiran Di Daerah	59
BAB III. CARA PENELITIAN	61
A. Jenis Penelitian	61
B. Lokasi Penelitian	64
C. Populasi Dan Metode Penentuan Sampel	64
D. Responden Dan Narasumber	65
E. Metode Pengumpulan Data	66
F. Tahapan Penelitian	67
G. Hambatan Penelitian Dan Pemecahannya	68
H. Analisis Data	69
BAB IV. PELAKSANAAN PERPARKIRAN DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA	71
A. Gambaran Umum Pelaksanaan Perparkiran di Wilayah Ko- ta Yogyakarta	71
1. Lokasi Fasilitas Perparkiran	71
2. Karcis Parkir Dan Retribusi Parkir	72
3. Klausula Baku Dalam Karcis Parkir	83
B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Laya- nan Parkir Terhadap Penggunaan Klausula Baku Dalam Kar- cis Parkir	88
1. Parkir Yang Dikelola Oleh Pemerintah Kota (Dinas Per- hubungan)	89
	vii

2. Parkir Yang Dikelola Oleh Badan (Swasta)	92
3. Parkir Yang Dikelola Oleh Perorangan (Pribadi)	95
C. Penggunaan Klausula Baku Dalam Karcis Parkir Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan	97
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN